

**ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA
(PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1979 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014)**

**SHERLY DANTI SUHARMARtha
B10018573**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai periode jabatan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari pengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, sejarah dan konseptual. Hasil analisa menunjukkan bahwa pengaturan mengenai periode jabatan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang menunjukkan adanya perubahan, dimana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah 2 periode, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 justru bertambah menjadi 3 periode. Apabila dikaitkan dengan masa jabatan, maka masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih lama dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Dari hal ini maka perbandingan pengaturan periode jabatan kepala desa antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menunjukkan perubahan yang nyata. Konsekuensi dari pengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menyebabkan pertentangan atau ketidakselarasan kebijakan mengenai periode jabatan kepala daerah lainnya dengan kepala desa, menimbulkan perilaku nepotisme yang hadir dalam konfigurasi politik di taraf lokal, serta terjadinya konflik politik dan sosial di tingkat desa yang mengganggu harmonisasi sosial masyarakat.

Kata Kunci: *pengaturan, periode jabatan, kepala desa*

**ANALYSIS OF THE ARRANGEMENT OF THE VILLAGE HEAD'S TERM
OF OFFICE (COMPARASION BETWEEN LAW NUMBER 5 OF 1979
WITH LAW NUMBER 6 OF 2014)**

**SHERLY DANTI SUHARMARtha
B10018573**

ABSTRACT

The purposes of this study are 1) to find out and analyze the arrangements regarding the term of office for village heads in Indonesia based on Law Number 5 of 1979 with Law Number 6 of 2014 concerning Villages and 2) to know and analyze the consequences of setting the term of office for village heads based on Law Number 5 of 1979 and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This type of research is normative juridical with statutory, comparative, historical and conceptual approaches. The results of the analysis show that the arrangement regarding the tenure of village heads in Indonesia based on Law Number 5 of 1979 and Law Number 6 of 2014 concerning Villages does show a change, where in Law Number 5 of 1979 there are 2 periods, whereas in Law Number 6 of 2014 actually increased to 3 periods. When it comes to the term of office, the term of office for the village head in Law Number 6 of 2014 is longer than in the previous law. From this, the comparison of village head tenure arrangements between Law Number 5 of 1979 and Law Number 6 of 2014 does not show any real changes. The consequence of setting the term of office for village heads based on Law Number 5 of 1979 and Law Number 6 of 2014 on Villages is to cause conflict or policy misalignment regarding the term of office of other regional heads and village heads, giving rise to nepotism that is present in political configurations in the local level, as well as the occurrence of political and social conflicts at the village level which disrupt the social harmony of the community.

Keywords: *arrangement, term of office, village head*